Nomor :

Tanggal : 20 November 2024

**Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Petakan Potensi TPS Rawan Pada Pemilihan 2024**

**Mentok, Bangka Barat** --- Bawaslu Kabupaten Bangka Barat petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 27 indikator, diambil dari 66 Kelurahan/Desa di 6 Kecamatan se – Kabupaten Bangka Barat yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024

Variabel dan indikator potensi TPS rawan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdatra di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/ kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

**6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi**

1. 187 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
2. 137 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri);
3. 109 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);
4. 55 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
5. 51 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK);
6. 29 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.

**5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Banyak Terjadi**

1. 5 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU);
2. 5 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
3. 4 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
4. 3 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
5. 2 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon.

**5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi yakni :**

1. 1 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
2. 1 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
3. 1 TPS di Lokasi Khusus;
4. 1 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
5. 1 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.

**Strategi Pencegahan dan Pengawasan**

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

1. melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
2. koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
3. sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
4. kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
5. menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online.*

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

**Rekomendasi**

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

1. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
2. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder,* baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
3. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.